



Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas (Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards to Realize Quality Financial Reports)

Anita Sari¹⁾, Kusmilawaty Kusmilawaty²⁾

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. William Iskandar Ps V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371

E-Mail: sarianita2002@gmail.com

Doi.: <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>

Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM),

Vol. 30

No. 01

Halaman 24-32

Bulan April, Tahun 2023

ISSN 0854-4190

E-ISSN 2685-3965

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:

22 Desember 2022

Tanggal Revisi:

28 Maret 2023

Tanggal Diterima:

5 April 2023

Abstract

The goal of this research was to look into how the analyze whether quality financial reports are realized with the implementation of accrual-based SAP and how to implement accrual-based SAP in government offices in 2023 with a focus on the Environment and Forestry Service of North Sumatra Province. Employees of the finance division of the Environment and Forestry Service of North Sumatra Province in 2023 were used in this study. This study employs qualitative research and data collection methods such as interviews, observations, and documentation According to the study's findings, the Government Accounting Standards on the Accrual Base have been fully implemented in the Environment and Forestry Service of North Sumatra Province in accordance with Government regulations, and there has been an improvement in the quality of financial statements that are more transparent and accountable.

Keywords: SAP; accrual-based; Financial statements

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menganalisis apakah terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dengan diterapkannya SAP berbasis akrual dan bagaimana penerapan SAP berbasis akrual pada kantor pemerintahan di tahun 2023, yang berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai sub bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual telah di terapkan sepenuhnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan Pemerintah, serta adanya peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: SAP; basis akrual; Laporan keuangan

PENDAHULUAN

Sekarang ini sektor publik di berbagai negara termasuk Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Setiap kantor Dinas, diperintahkan harus melakukan *Good Government Governance (GUG)* (Novianti et al., 2018). Tidak sedikit kita mendengar di media massa dan kalangan masyarakat perihal banyaknya terjadi korupsi. Pada tahun 2021 telah terjadi 553 kasus korupsi dengan tingkat kerugian Rp29,4 T (Aryodammar, n.d.). Contoh kasus yang terjadi ialah kasus pidana pada korupsi bansos yang dilakukan Juliari Batubara selaku mantan menteri sosial Indonesia, yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat (Putriani & Astuti, 2023) hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Demi menghindari *mindset* buruk masyarakat dan pengguna laporan keuangan, harus dipahami bagaimana melakukan tata kelola yang baik pada instansi pemerintahan. Tata kelola yang baik tersebut dapat dilihat dari tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan (Pujanira & Taman, 2017).

Berdasarkan kasus yang diuraikan sebelumnya menunjukkan tingkat transparansi dan juga akuntabilitas menjadi hal yang amat penting dan harus ditingkatkan pada setiap sektor publik yang ada (Mahartini et al., 2021). Oleh karena itu, sudah seharusnya tingkat transparansi perlu untuk diterapkan dengan tujuan membangun kepercayaan antara pemerintahan dengan masyarakat dalam hal penyediaan informasi dan memberi kemudahan ketika masyarakat ingin memperoleh informasi yang akurat. Tidak hanya itu, akuntabilitas perlu ditingkatkan juga sebagai tanggung jawab dalam hal kesuksesan atau kegagalan dalam proses pelaksanaan untuk meraih tujuan dan juga sasaran yang sudah direncanakan dengan menggunakan media-media pertanggungjawaban secara periodik (Hayadi & Rosini, 2020). Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Dengan adanya transparansi maka akan terwujud akuntabilitas (Jati, 2019).

Sebagai bentuk usaha pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan juga akuntabel, pemerintah harus mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Sari, 2022) yang harus diimplementasikan ketika membuat serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rosna & Wira Bharata, 2023). Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan kewajiban pencatatan keuangan untuk semua instansi dengan menggunakan basis akrual, pada pemerintah pusat, ataupun juga pemerintah di daerah (Putra & Varina, 2021). Ketetapan ini sudah diatur melalui UU No. 71 tahun 2003 perihal keuangan Negara, terdapat pada pasal 3 ayat 1 tentang pengakuan serta pengukuran pada pendapatan serta belanja dengan basis akrual harus diterapkan paling lama lima tahun, dengan itu tahun 2010 saat bulan Oktober pemerintah sudah memuat Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang SAP basis Akrua (Sako & Lantowa, 2018).

Adanya SAP berbasis akrual akan memberi gambaran atas posisi keuangan pemerintah dan menyajikan informasi yang sebenarnya tentang hak dan juga kewajiban pemerintah (Haq, 2023). SAP dengan basis Akrua ialah standar dalam akuntansi yang membenarkan adanya pendapatan, beban, asset, utang, serta ekuitas ketika menyajikan laporan finansial dengan basis akrual (Sudaryati & Permana, 2020). Selain itu SAP ini digunakan untuk mengakui atau membenarkan adanya pendapatan, belanja serta pembiayaan saat melaporkan pelaksanaan perihal anggaran dengan basis yang telah diterapkan pada APBN dan juga APBD. Standar Akuntansi dengan basis akrual pada neraca dimana asset, kewajiban, serta ekuitas dana diakui serta dilakukan pencatatan saat terjadinya transaksi, atau dapat dikatakan saat keadaan lingkungan memberikan pengaruh pada keuangan pemerintah, dengan tidak melihat saat kas dapat diterima (Langelo et al., 2015).

Untuk menegaskan kepada semua instansi pemerintahan yang ada, selanjutnya pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yaitu berisi pemerintah daerah Provinsi, dan Kabupaten, diwajibkan untuk mengaplikasikan SAP basis akrual pada anggaran tahun 2015. SAP dengan berbasis akrual diterapkan dengan tujuan untuk

meningkatkan kebermanfaatan pada laporan keuangan di pemerintahan daerah bagi pengguna kepentingan pada entitas instansi pemerintah ketika menilai akuntabilitas dan juga transparansi serta sebuah keputusan kepada suatu instansi pemerintah daerah (Safitri et al., 2018). Jati dirinya Laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja pemerintah untuk memberikan tanggung jawab setiap akhir tahun anggaran (Rahayu, 2020). Tentu dengan adanya perubahan SAP ini, akan menjadi perhatian yang khusus bagi Pemerintah karena penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual telah berakhir pada tahun 2014. Selanjutnya mulai tahun 2015 harus menerapkan secara penuh SAP basis akrual. Hal ini tentu saja menuntut kesiapan seluruh instansi dalam hal penerapan SAP berbasis akrual. Seharusnya seluruh kantor pemerintahan sudah menerapkan standar akuntansi dengan basis akrual pada tahun 2023, namun kenyataannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan (Langelo et al., 2015) masih ada pemerintahan yang belum menerapkan SAP basis akrual, tepatnya pada pemerintah kota Bitung, dengan alasan terdapat kendala yang dihadapi seperti SDM belum mencukupi dan perangkat pendukung yang belum teruji.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subhi & Yuhertiana (2021) mengungkapkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi masih perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena basis akrual dinilai lebih kompleks. Tantangan yang ditemukan dalam penerapan SAP ini antara lain, jumlah SDM yang kompeten dan teknologi informasi yang mumpuni. Berlandaskan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis implementasi SAP berbasis akrual dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Pengaplikasian SAP berbasis akrual pada kantor pemerintahan harus memperhatikan kesesuaiannya dengan PP yang telah dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena menurut Kusuma et al., 2023 metode kualitatif memiliki kriteria berupa terbentuknya pemahaman, terbentuknya subyektifitas, dan mengacu pada nilai yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Jln. Sisimangaraja Km. 5,5, No. 14, Marindal, Harjosari II, Medan Amplas, Sumatera Utara. Dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2023. Data dikumpulkan melalui obserbasi, penyebaran angket, wawancara, serta dari dokumentasi yang ada.

Angket disampaikan kepada staff keuangan sebanyak sembilan orang, yang karena kesibukan mereka tidak dapat dilakukan wawancara satu persatu. Pemilihan responden ini dikarenakan mereka yang terlibat dalam urusan keuangan kantor dan tahu banyak tentang seluk beluk akuntansi di kantornya dan sangat paham terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

Dari hasil angket ini kemudian dilakukan triangulasi melalui wawancara kepada bendahara pengeluaran yang memegang kendali atas laporan keuangan kantor. Data yang telah terkumpul melalui penyebaran angket selanjutnya ditabulasi, sedangkan hasil wawancara ditranskripsikan. Berdasarkan tabulasi data, dan transkrip wawancara kemudian dipadukan dengan hasil observasi untuk selanjutnya dianalisis dan dikelompok-kelompokkan berdasarkan tema yang diperoleh dan ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tabulasi data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada staf bagian keuangan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Jawaban Responden

Nomor	Nama Responden	Jawaban untuk pertanyaan no.				
		1	2	3	4	5
1	Ka sub bag Keuangan	a	d	a	sejak sk ditetapkan	a
2	Pemeriksa transaksi dan laporan keuangan	a	c	a	sejak awal masuk	a
3	Pemeriksa laporan dan transaksi keuangan	a	d	b	Tidak tahu	a
4	Bendahara penerimaan	a	c	b	sejak sk ditetapkan	a
5	Penyusun Laporan Keuangan	a	d	a	sejak sk ditetapkan	a
6	Pengelola gaji pegawai	a	b	b	Tidak tahu	a
7	Pengadministrasi Anggaran	a	d	b	sejak diwajibkan	a
8	Pengadministrasi Keuangan	a	d	a	Tidak tahu, Hanya mengikuti SOP	a
9	Pengadministrasi Keuangan	a	c	b		a

Respon yang diberikan sebagaimana tampak pada tabel 1, diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan berikut.

- 1) Apakah anda sebagai pegawai di bidang keuangan, mengetahui apa itu SAP berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan? Jawaban : a= iya , b = tidak
- 2) Seberapa besar tingkat pemahaman kamu dalam menyusun laporan keuangan dengan SAP berbasis akrual?
 - a. 10 % - 30 %
 - b. 31 % - 60 %
 - c. 61% - 90 %
 - d. Di atas 90%
- 3) Apakah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual sudah diterapkan saat menyusun laporan keuangan?
 - a. Seluruhnya sudah diterapkan
 - b. Sebagian Besar Diterapkan
 - c. Kadang-kadang diterapkan
 - d. Sebagian Kecil diterapkan
 - e. Tidak Pernah diterapkan
- 4) Sejak Tahun berapa Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual diterapkan di kantor ini? Jawaban :
- 5) Apakah dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparans dan akuntabilitas?
 - a. Ya, meningkatkan kualitas laporan keuangan
Alasannya: _____
 - b. Tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan
Alasannya: _____.

Berdasarkan hasil tabulasi data yang ditunjukkan pada tabel 1 tampak bahwa semua pegawai bagian keuangan mengetahui apa itu SAP berbasis akrual, namu yang benar-benar paham tentang SAP basis akrual hanya 5 orang, sedangkan yang lain pemahamannya kurang dari 90%. Di samping itu, respon terhadap pertanyaan nomor 3 bervariasi, hanya lima orang dari mereka yang yakin telah diterapkan seluruhnya, sedangkan selebihnya menjawab sebagian besar, bahkan ada tiga orang yang menjawab kadang-kadang saja diterapkan. Tanggapan terhadap pertanyaan nomor 4 juga bervariasi ada yang yakin bahwa SAP basis akrual ini sudah diterapkan sejak dikeluarkan SK, ada juga yang tidak tahu sejak kapan. Mereka yang menjawab

tidak tahu dikarenakan baru bergabung di bagian keuangan dan sejak mereka masuk, SAP akrual basis sudah diterapkan. Respon atas pertanyaan ke lima semua menjawab dengan pilihan a, yang artinya SAP ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasan mereka senada yang menyatakan bahwa SAP basis akrual lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diungkapkan beberapa hal terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara.

1) Pemahaman terhadap SAP berbasis Akrual

Berdasarkan hasil tabulasi data yang ditunjukkan pada tabel 1, semua staff bagian keuangan sudah paham tentang penerapan SAP berbasis akrual, dan paham akan manfaat yang diperoleh dari SAP basis akrual ini. Hal ini dikuatkan oleh jawaban bendahara saat ditanya apakah semua pegawai di sini paham tentang SAP basis akrual, jawabnya: *"Paham, karena laporan keuangan yang sebelumnya sudah menerapkan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP basis akrual"*. Namun, jawaban yang bervariasi terhadap pertanyaan nomor dua mengesankan, bahwa sebenarnya sebagian dari mereka menjalankan peraturan ini karena adanya perintah yang mengharuskan melakukannya, tanpa paham untuk apa dan bagaimana peraturan itu harus diterapkan. Kesan ini diperoleh juga dari bendahara saat ditanya *"apakah penyusunan dan pelaporan dilakukan secara manual atau terkomputerisasi, maka jawabannya adalah: "Untuk mencatat transaksi nya itu dilakukan secara manual dulu dek di computer, tapi untuk menyusun laporan keuangan nya kita sudah menggunakan sistem yang disediakan oleh pemerintah"*. Berikut dikatakannya: *"Kantor ini menggunakan FMIS dengan menggunakan basis SIMDA. Jadi nanti kami tinggal memasukkan aja jumlahnya disini, dan nanti akan tersaji laporan keuangan nya"*

2) Implementasi SAP berbasis Akrual

Penerapan SAP berbasis akrual di kantor ini belum diterapkan 100 %, karena ternyata ada beberapa transaksi yang dilakukan dengan berbasis kas, yaitu ketika ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk laporan realisasi anggaran. Namun di sisi lain untuk laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca diterapkan dengan basis akrual dimana ketika adanya transaksi atau peristiwa diakui, dicatat, dan dilaporkan pada laporan keuangan ketika pengeluaran terjadi. dengan tidak melihat kas diterima ataupun dibayarkan.

Dalam laporan keuangan yang disajikan, terdapat penjelasan mengenai peraturan penerapan SAP dengan basis akrual, dimana penerapan SAP tidak hanya diatur oleh peraturan pemerintah pusat, namun juga didukung dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu,

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2015 mengenai Sistem Akuntansi Basis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 Tahun 2022 berkenaan Kebijakan Akuntansi Basis Akrual.

Berdasarkan surat keterangan ini tampak bahwa, Gubernur Sumatera Utara mewajibkan seluruh sektor publik di wilayah Sumatera Utara untuk menerapkan sistem pencatatan akuntansi dengan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk juga pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Surat keterangan ini telah menjadi acuan pegawai sub bagian keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan

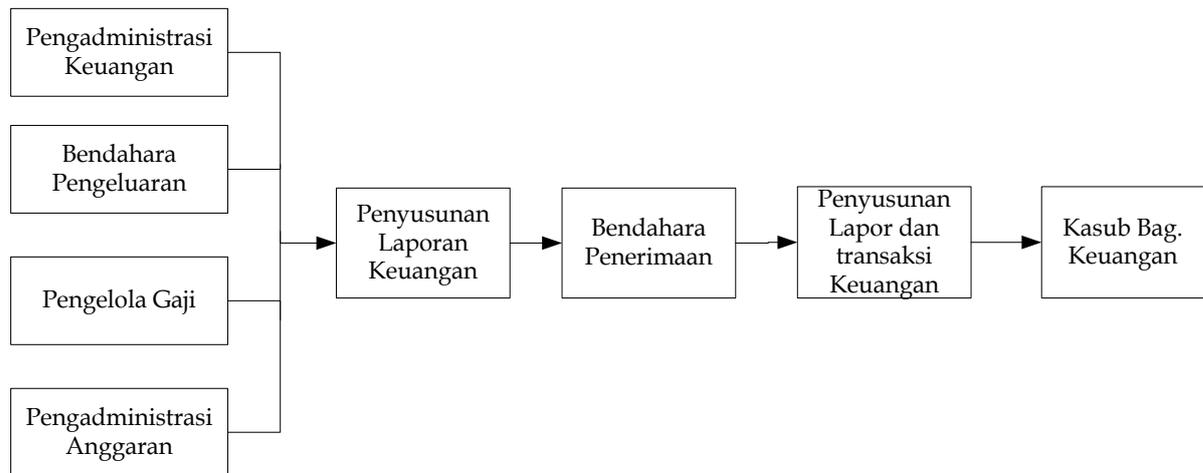
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun oleh Sub bagian keuangan dan di setujui oleh kepala Dinas. Setiap pegawai bagian keuangan telah ditetapkan peran dan juga fungsinya masing-masing dalam menyusun laporan keuangan. Setiap pegawai pada bagian keuangan mendapatkan bagian yang berbeda-beda dalam menyusun laporan keuangan, mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing sehingga mereka wajib fokus dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka.

Seiring diterapkannya SAP berbasis akrual sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, setiap kantor pemerintahan dituntut untuk melakukan kesiapan dari berbagai aspek. Ketika menyusun laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menggunakan bantuan aplikasi yang sesuai dengan peraturan, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan aplikasi yang dapat digunakan dalam meyusun laporan keuangan yaitu FMIS, yang dapat kita akses pada *website* <https://sumaterautaraprov.fmis.id/> aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan basis SIMDA dengan tujuan mempermudah manajemen keuangan daerah serta meminilisir terjadinya kesalahan pada laporan keuangan (Hartati et al., 2020).

Implementasi SAP basis akrual pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan dengan beberapa laporan yang telah dibuat yaitu, (1) tersedianya laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sisa anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. **Laporan Realisasi Anggaran**, merupakan informasi disajikan meliputi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa atau lebih pembiayaan anggaran, dimana dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. **Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih**, merupakan informasi yang meliputi kenaikan/penurunan SAL tahun pelaporan. **Neraca**, laporan yang disajikan meliputi posisi keuangan mengenai asset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal. **Laporan Operasional**, laporan yang disajikan meliputi seluruh kegiatan operasional keuangan. **Laporan perubahan ekuitas**, laporan yang disajikan meliputi formasi perubahan ekuitas, yang terdiri ari ekuitas awal, surplus atau deficit, koreksi, dan ekuitas akhir **Laporan Arus Kas**, laporan yang disajikan meliputi sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi. **Catatan Atas Laporan Keuangan**, laporan yang disajikan meliputi penjelasan atau daftar analisis atas nilai yang disajikan dalam laporan diatas untuk pengungkapan yang memadai.

PP nomor 71 tahun 2010 yang selanjutnya diperkuat oleh Permendagri pada Nomor 64 tahun 2013 yang menjelaskan mengenai penyajian dalam laporan keuangan dengan basis akrual, setiap transaksi dicatat pada dua jenis jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Jurnal Finansial, meliputi pencatatan segala jenis transaksi yang akan mempengaruhi akun belanja, rekening kas pada pejabat bagian tata kelola keuangan daerah dan kas pada bendahara pengeluaran lalu di susun dalam laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan, jurnal anggaran, dicatat semua transaksi operasional APBD pada periode berjalan yang mempengaruhi akun pada beban dan perubahan saldo anggaran lebih yang disusun dalam laporan operasional.

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah mengimplementasikan SAP basis akrual untuk setiap tahap penyusunan laporan keuangan dan sudah menerapkan kedua jurnal pada setiap transaksi yang dilakukan. Dengan diterapkannya SAP berbasis akrual, kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik. Hal ini tampak dari tingkat transparansi yang menyediakan informasi keuangan dengan jelas kepada masyarakat. Alur yang wajib diketahui dan dilakukan ketika menyusun laporan keuangan agar hasilnya memiliki kualitas yang baik tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Alur Penyusunan Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh staf bagian keuangan sudah paham tentang SAP basis akrual, meskipun tingkat pemahaman masing-masing individu berbeda-beda. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 tahun 2015, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 23 tahun 2022. Penerapan ini menunjukkan adanya kepatuhan staff terhadap peraturan yang ditetapkan. Dengan diterapkannya SAP basis akrual kualitas laporan keuangan instansi ini meningkat, yang dapat dilihat dari transparansi dan akuntabilitasnya karena menggunakan FMIS berbasis SIMDA.

Penelitian ini dilakukan di tengah-tengah kesibukan para nara sumber, sehingga pengumpulan data yang semula direncanakan akan dilakukan melalui wawancara langsung kepada semua nara sumber, hanya dapat dilakukan kepada satu orang saja, selebihnya pertanyaan disampaikan dalam bentuk angket yang dijawab secara tertulis oleh narasumber yang lain, juga tambahan dokumen sebagai pelengkap data yang dibutuhkan. Dengan keterbatasan ini mengakibatkan ada beberapa hal yang mungkin tidak terungkap secara rinci ditambah lagi ada beberapa staf yang belum paham sepenuhnya tentang SAP berbasis akrual ini. Oleh karena itu untuk penelitian berikutnya dapat memperluas obyek penelitian dengan menggunakan mixed method dalam pengumpulan dan analisis datanya, sehingga dapat diungkap lebih jauh kesiapan setiap aparat pemerintah yang memahami SAP basis akrual ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryodammar. (n.d.). *ICW: Ada 553 Kasus Korupsi dengan Kerugian Rp29,4 T Selama 2021*. 18 April 2022.
- Haq, K. (2023). *Implementasi Metode Accrual Basis Pada Sistem Informasi Keuangan*. 4(2), 562-568. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i2.2924>
- Hartati, S., Hendri, E., Hendri, E., Lilianti, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5040>

- Hayadi, N., & Rosini, I. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 16(2), 243-256.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/2487>
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1-14.
<https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
- Kusuma, P., Putri, D., Adeni, S., & Zulfiningrum, R. (2023). *Aplikasi Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif Bagi Mahasiswa*. 6(1), 86-91.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruaal Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1-8.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125-1134.
- Novianti, I., Syamsidar, M., & Syawalina, C. F. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01), 115-130.
<https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85-98.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Putriani, A., & Astuti, W. (2023). *Analisis Implementasi Profil Pelajar Pancasila Dampak Korupsi Bantuan Sosial Terhadap Kasus Kelaparan di Desa Curug Sangereng Tahun 2021*. 05(02), 3531-3539.
- Rahayu, D. P. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruaal, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keaungan *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(71), 87-96.
<http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/683>
- Rosna, L., & Wira Bharata, R. (2023). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruaal Terhadap Kualitas Laporan Penyajian Laporan Keuangan*. 3(1), 23-34.
- Safitri, A., Heriyanto, M., & Mariaty Ibrahim, dan. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 15(2), 226-236.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/4762>

- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43-54. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101>
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1). <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Equity*, 24(2), 141-156. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>
- Wahyudi, I. (2019). Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol.4, No., 13-22.